

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Mobilitas sosial merupakan perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya (Horton & Hunt, 1999: 36). Perpindahan kelas tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi kehidupan agar lebih baik. Tetapi dalam pembahasan yang lebih luas, hakikat dari mobilitas sosial tidak hanya sebatas itu saja. Ada status sosial yang juga menjadi *point* penting dalam mobilitas sosial. Ketika seseorang atau sekelompok masyarakat memobilisasi/melakukan mobilitas, sesungguhnya juga ada status/kedudukan yang diinginkan dari proses mobilitas tersebut. Pada umumnya mobilitas sosial ada dalam setiap masyarakat dan dilakukan oleh setiap orang; sekalipun dalam sistem kasta tertutup meski terdapat banyak kesulitan dalam prosesnya (Nasution: 2011).

Mobilitas sosial yang dilakukan oleh manusia tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar. Terkadang upaya tersebut dalam prosesnya justru statis (jalan di tempat) bahkan seseorang bisa saja malah jatuh ke kehidupan yang lebih buruk dari sebelumnya. Berdasarkan uraian singkat di atas, sederhananya mobilitas sosial dapat diartikan sebagai perpindahan/gerak sosial yang dilakukan seseorang atau sekelompok masyarakat dari satu strata (kelas sosial) ke strata lain biasanya dengan tujuan memperbaiki kualitas hidup.

Umumnya mobilitas sosial lebih mudah dan sering terjadi dalam masyarakat bersistem stratifikasi terbuka (tanpa kasta). Hal ini dikarenakan dalam masyarakat tanpa kasta tidak ada aturan baku maupun intimidasi bagi siapa saja yang ingin menaikkan status sosialnya. Artinya mobilitas sosial bebas dilakukan siapa saja.

Salah satu kelompok masyarakat bersistem stratifikasi terbuka yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah ‘masyarakat nelayan’.

Nelayan atau masyarakat nelayan merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang pada umumnya tinggal/menetap di daerah pesisir atau bibir pantai dengan menjadikan laut (sumber daya yang dikandung laut) sebagai sumber nafkah utama. Dewasa ini ‘nelayan’ ramai dibicarakan khususnya dalam lingkup sosial, ekonomi, dan hukum. Pasalnya dikarenakan sejumlah problema yang melekat dalam kehidupan nelayan, utamanya adalah persoalan kemiskinan.

Martadiningrat dalam *Harian Antara* (2008: 1) menyatakan, salah satu komunitas bangsa Indonesia yang teridentifikasi sebagai golongan miskin pada saat ini adalah nelayan, dimana sedikitnya 14,58 juta jiwa atau sekitar 90 persen dari 16,2 juta jumlah nelayan di Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Hal yang senada juga diutarakan Kusnadi (2002: 4) bahwa nelayan merupakan salah satu bagian dari anggota masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan paling rendah. Dengan kata lain, masyarakat nelayan adalah masyarakat paling miskin dibanding anggota masyarakat subsistem lainnya.

Masyarakat nelayan umumnya bersistem stratifikasi terbuka yang seharusnya memudahkan masyarakat nelayan untuk melakukan berbagai bentuk mobilitas sosial, tetapi masih banyak nelayan kita justru hidup dalam kemiskinan. Seperti yang dipaparkan Retnowati (2011) dalam jurnalnya *Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum)*:

“Dengan memperhatikan luasnya wilayah laut yang dimiliki Indonesia serta melimpahnya sumber daya ikan yang dikandungnya maka secara logika menunjukkan terbukanya peluang kerja di sektor ini dan adanya kehidupan nelayan yang mapan. Namun dalam realitanya kehidupan nelayan Indonesia masih sangat memprihatinkan. Kemiskinan masih dijumpai di daerah-daerah pesisir, nelayan rentan terhadap konflik antar mereka...” hal 152,

“Pada sisi lain jika kita melihat potensi sumber daya ikan di wilayah laut Indonesia yang begitu besar, namun kemampuan dan budaya nelayan kita masih sangat terbatas. Sektor perikanan tangkap sesungguhnya merupakan sumber kekuatan sosial ekonomi nelayan dan umumnya merupakan salah satu penyangga sektor ekonomi nasional. Jika sektor ini dimanfaatkan secara maksimal serta digarap secara optimal oleh nelayan Indonesia, maka dapat menjadi sumber ekonomi yang sangat besar.” Hal 155.

Kenyataan ini sudah seharusnya ditangani dengan serius, terutama oleh instansi-instansi terkait. Walau bagaimana pun juga nelayan memegang posisi yang *urgent* dalam perekonomian negara ini. Seperti pemaparan Kusnasi dan Martadingrat di atas bahwa nelayan di Indonesia masih berada dibawah garis kemiskinan, hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk mengetahui bagaimana mobilitas sosial yang terjadi pada masyarakat nelayan. Apakah mereka mampu melakukan mobilitas sosial ke arah yang lebih baik lagi atau malah sebaliknya. Sehingga pada akhirnya akan diketahui apa yang menjadi penyebab mobilitas sosial yang mereka alami, dan diharapkan hal tersebut dapat membantu para nelayan memiliki hidup yang lebih baik lagi.

Saat ini di Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara, produksi ikan tangkapan yang berasal dari beberapa Kabupaten/Kota pertahunnya terbilang besar. Pada tahun 2015, tujuh Kabupaten dengan produksi ikan tangkapan terbesar di antaranya adalah Asahan, Medan, Langkat, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tanjung Balai, dan Nias. Hal ini secara lengkap dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Produksi Ikan Menurut Asal Tangkapan dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (ton) 2013

| No. | Kabupaten/Kota | Laut | Perairan Umum | Darat | | Bud. Laut | Jumlah |
|-----|-----------------|-----------|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Bud. Air Tawar | Bud. Laut | | |
| 1. | Asahan | 112.887,0 | 19.852,0 | 1.545,0 | 150,0 | - | 123.434,0 |
| 2. | Medan | 77.687,7 | 56,7 | 419,0 | 478,0 | 664,0 | 79.305,4 |
| 3. | Langkat | 33.084,0 | 7,7 | 3.244,0 | 21.337,0 | 3.238,0 | 60.910,0 |
| 4. | Sibolga | 56.156,6 | - | 25,0 | - | - | 56.181,6 |
| 5. | Tapanuli Tengah | 43.777,4 | 1.911,2 | 219,0 | 150,0 | 416,0 | 46.473,6 |
| 6. | Tanjung Balai | 37.298,0 | - | 48,0 | - | - | 37.346,0 |
| 7. | Nias | 36.265,6 | - | 73,0 | - | - | 36.338,6 |

Sumber: BPS Sumut 2015

Jumlah nelayan di Sumatera Utara pada tahun 2014 tercatat mencapai 262.695 jiwa yang terbagi dari beberapa Kabupaten yang bersumber dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015; Kabupaten Langkat menjadi salah satu Kabupaten penyumbang produksi ikan terbesar ketiga setelah Kabupaten Asahan dan Medan, seperti yang tertera pada tabel 1.

Jumlah nelayan di Kabupaten Langkat tercatat sebanyak 18.320 jiwa yang berasal dari sembilan Kecamatan berdasarkan data BPS Langkat pada tahun 2013. Data lengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2. Jumlah nelayan di Kabupaten Langkat 2013

| No. | Kecamatan | Nelayan |
|---------------|----------------|---------------|
| 1. | Secanggang | 3.919 |
| 2. | Tanjung Pura | 2.681 |
| 3. | Gebang | 1.471 |
| 4. | Babalan | 1.097 |
| 5. | Sei Lapan | 2.168 |
| 6. | Brandan Barat | 2.071 |
| 7. | Besitang | 593 |
| 8. | Pangkalan Susu | 3.675 |
| 9. | Pematang Jaya | 645 |
| Jumlah | | 18.320 |

Sumber: BPS Langkat 2014

Pada tabel 2, jumlah nelayan terbanyak ke-3 di Kabupaten Langkat berada di Kecamatan Tanjung Pura, setelah Secanggang dan Pangkalan Susu. Tanjung

Pura pada dasarnya memiliki potensi kelautan yang cukup tinggi. Empat desanya yaitu Kwala Langkat, Kwala Serapuh, Bubun, dan Tapak Kuda merupakan desa pesisir yang berada tepat di Selat Malaka. Hal ini membuat hampir seluruh penduduk di empat desa tersebut terintegral dengan pekerjaan sebagai nelayan.

Hasil dari observasi pra penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa dari seluruh desa di Kecamatan Tanjung Pura, populasi nelayan terbesar berada di desa Tapak Kuda. Desa ini dihuni 503 kepala keluarga (sumber: BPS Kabupaten Langkat, 2015). Dari 503 KK tersebut, 85% -nya bekerja sebagai nelayan (Berdasarkan informasi dari Sekretaris Camat Kecamatan Tanjung Pura dalam observasi pra penelitian). Artinya hampir semua masyarakat Desa Tapak Kuda menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Dalam kegiatan pemasaran hasil laut, nelayan Desa Tapak Kuda juga sudah melakukan kegiatan ekspor ikan keluar Negeri seperti Singapura dan Malaysia. Kegiatan ekspor ini sudah dilakukan sejak tahun 2005 sampai sekarang. Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang bagi peneliti untuk melihat mobilitas sosial yang terjadi di Desa Tapak Kuda.

Berdasarkan data dan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana mobilitas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat nelayan di Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mobilitas sosial yang terjadi pada masyarakat nelayan di desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mobilitas sosial yang terjadi pada masyarakat nelayan di Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam bentuk ide-ide baru yang bisa memaksimalkan proses mobilitas sosial masyarakat di Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.
2. Sebagai masukan bagi Pemerintah terkait, khususnya dalam merancang dan menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat nelayan di desa Tapak Kuda.
3. Menjadi bahan rujukan untuk penelitian lanjutan; dan menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian dengan tema mobilitas sosial.

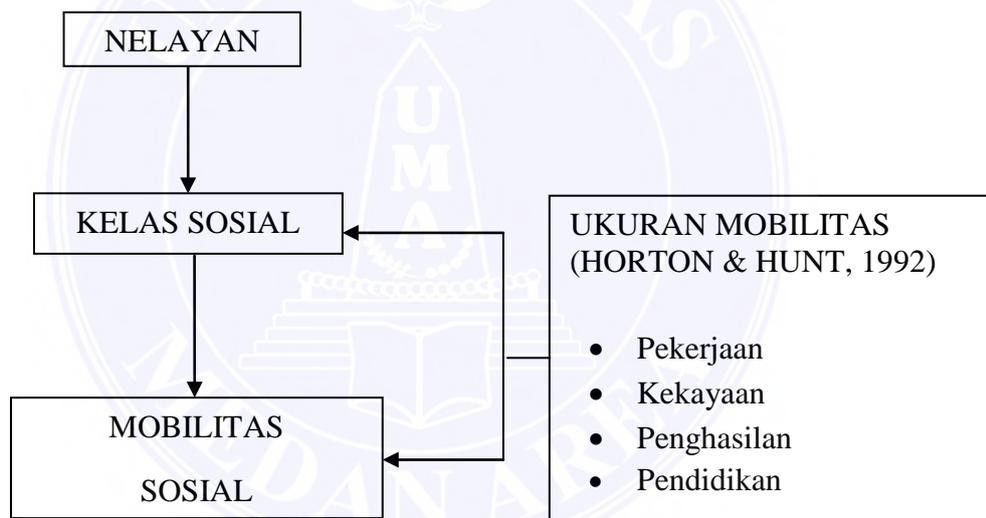
1.5. Kerangka Pemikiran

Mobilitas sosial adalah perpindahan/gerak sosial yang dilakukan seseorang atau sekelompok masyarakat dari satu strata (kelas sosial) ke strata lain yang sederajat atau pun tidak sederajat. Mobilitas sosial dapat terjadi pada semua individu atau pun masyarakat, tetapi mobilitas sosial lebih mudah terjadi pada masyarakat yang stratifikasinya bersifat terbuka.

Nelayan atau masyarakat nelayan adalah salah satu masyarakat yang memiliki sistem stratifikasi yang terbuka. Namun masyarakat nelayan masih

memperoleh penghasilan yang terbilang rendah. Sehingga dengan keadaan ekonomi nelayan yang berada pada kelas ekonomi menengah kebawah, maka perlu dilihat bagaimana mobilitas sosial yang terjadi pada masyarakat nelayan itu sendiri sehingga dapat menempati suatu tempat atau kelas pada struktur masyarakat.

Menurut Horton dan Hunt (1992:7) ukuran yang menentukan seseorang berada pada suatu kelas tertentu dapat dilihat dari pekerjaan, kekayaan, penghasilan dan pendidikan. Secara sistematis kerangka pemikiran pada proposal penelitian ini dapat digambarkan pada bagan 1:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran